

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SMK NEGERI 1 PANA KABUPATEN MAMASA

Tadius, S.Pd., M.Pd.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Kristen Indonesia Toraja

tadiust@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Negeri 1 Pana di tinjau dari beberapa komponen manajemen pengelolaan sekolah yang dibatasi pada manajemen organisasi, manajemen kesiswaan, dan manajemen keuangan. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu mencari fakta, keadaan serta fenomena yang selanjutnya dideskripsikan, serta dianalisa dalam rangka menjawab pertanyaan. Dalam pengumpulan data, peneliti bertindak selaku instrumen penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi: (1) manajemen organisasi, (2) manajemen kesiswaan, dan (3) manajemen keuangan. Adapun teknik penumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Implementasi manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri 1 Pana belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan, terutama peran serta masyarakat mendukung sekolah dalam bantuan keuangan.

Kata kunci: manajemen organisasi, kesiswaan, keuangan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan elemen penting dari kehidupan seseorang dan merupakan aspek strategis bagi suatu negara. Sifat pendidikan adalah kompleks, dinamis dan kontekstual. Oleh karena itu, pendidikan bukanlah hal yang mudah atau sederhana untuk dibahas. Kompleksitas pendidikan ini menggambarkan bahwa pendidikan adalah suatu upaya yang serius karena pendidikan melibatkan aspek kognitif, afektif, dan keterampilan yang akan membentuk diri seseorang secara keseluruhan menjadi manusia seutuhnya. Mengacu pada kompleksitas dan dinamisasi pendidikan tersebut, maka para pakar dan pemerhati pendidikan telah banyak menyumbangkan pemikirannya dengan maksud untuk memperbaiki mutu dan memajukan pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, sikap sosial dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Perubahan dalam konteks lokal tidak bisa dilepaskan dari perubahan yang terjadi dalam skala nasional. Meskipun demikian dengan diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan berbagai urusan pemerintahan,

termasuk pendidikan. Dengan kebijakan itu kabupaten/kota memikul tanggung jawab besar dalam pengelolaan pendidikan, sehingga maju mundurnya pendidikan di masa depan akan bergantung pada kemampuan kabupaten/kota dalam mengelola pendidikannya.

Kebijakan otonomi daerah di bidang pendidikan di samping menghadapi sejumlah tantangan juga memiliki peluang untuk diraih di masa depan. Peluang tersebut meliputi peluang pasar, dukungan sumber daya alam, kompetisi mutu, dan partisipasi masyarakat. Peluang pertama bersumber dari masih terbukanya lapangan usaha (pasar) di masyarakat yang senantiasa mengharapkan produk barang dan jasa yang bermutu. Ini berarti bahwa tugas pendidikan adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan di dunia kerja. Aspek sikap kerja kerap kali menghambat lulusan lembaga pendidikan untuk memasuki dunia kerja. Sikap dasar yang diperlukan dunia kerja dewasa ini adalah memiliki integritas pribadi, mandiri, kreatif, proaktif, disiplin, kerja keras, dan dinamis (Arismunandar, 2006).

Model pendekatan profesionalisme dan pemberdayaan satuan pendidikan ini adalah menerapkan suatu sistem pengelolaan pendidikan yang bersifat desentralistik, yaitu manajemen sekolah yang lebih otonom dalam mengelola sumber dayanya. Model ini menggantikan sistem yang selama ini sentralistik dan intervensi yang berlebihan dari kalangan birokrasi pemerintahan. Manajemen sekolah yang lebih otonom diasumsikan akan mendorong motivasi diri sekolah, dalam arti luas berarti mengoptimalkan sumber daya dan potensinya sendiri. Sedangkan kedudukan pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi kebutuhan sekolah agar sekolah dapat melaksanakan fungsi tugas dan

tanggung jawabnya sesuai standar yang ditentukan.

Wawasan tentang manajemen pendidikan dalam arti luas maupun dalam arti sempit perlu dimiliki oleh kepala sekolah, guru, penyelenggara yayasan pendidikan, praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan, dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Seni mengelola sekolah terus bergerak secara dinamis mengikuti perubahan yang berkembang dalam masyarakat. Perkembangan ini diakibatkan oleh adanya desakan kebutuhan dan juga kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, satuan pendidikan sebagai institusi yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan belajar dan melaksanakan aktivitas pembelajaran harus mendesain manajemennya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Tingkat kepedulian masyarakat yang cenderung rendah untuk mendukung program sekolah merupakan salah satu bagian dari problematika pendidikan. Hal yang dapat dirasakan berkaitan dengan kepedulian masyarakat ini, menurut Sagala (2004) antara lain:

1. Pemahaman terhadap problematika pendidikan oleh masyarakat yang kabur;
2. Lemahnya kemampuan memberi bantuan dan dukungan dana untuk pendidikan;
3. Rendahnya daya dukung dan fasilitas pendidikan di sekolah;
4. Kepekaan birokrasi pemerintah termasuk birokrasi pendidikan yang tumpul atas aspirasi masyarakat;
5. Kepekaan parlemen atau legislatif yang rendah atas kebutuhan masyarakat ditandai dari program pendidikan belum menjadi prioritas pembangunan;
6. Kepastian dan komitmen politik pemerintah yang kabur merespon tuntutan lingkungan strategis di bidang pendidikan; dan

7. Keengganan memikirkan peran yang mungkin dilakukannya dalam program pendidikan di daerahnya.

Lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang berimbang pada desentralisasi dan otonomi pendidikan, sedikitnya akan dapat mengurangi cengkraman pusat terhadap sekolah. Dengan kata lain sekolah dapat lebih leluasa mengatur segala sesuatu yang terjadi di sekolah.

Penerapan manajemen berbasis sekolah di tingkat SLTP secara umum sudah berjalan kurang lebih sepuluh tahun, sehingga diharapkan memberikan perubahan yang positif bagi sistem manajemen pengelolaan sekolah termasuk di SMP Negeri 1 Pana, kabupaten Mamasa. Meskipun secara geografis sekolah ini berada di pelosok daerah terpencil, diharapkan implementasi MBS di sekolah ini sudah dapat dilaksanakan demi pemerataan peningkatan mutu pendidikan sesuai yang diharapkan.

Untuk mencapai harapan itu, dalam konsep pelaksanaan MBS, sedikitnya terdapat tujuh komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik, meliputi (1) manajemen organisasi dan kelembagaan sekolah, (2) kurikulum dan program pengajaran, (3) tenaga kependidikan, (4) kesiswaan, (5) keuangan, (6) sarana dan prasarana pendidikan, serta (7) pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat (Mulyasa, 2004).

Salah satu indikator keberhasilan MBS adalah bagaimana masyarakat secara aktif berperan serta dalam mewujudkan berbagai program kegiatan sekolah. Akan tetapi dalam rangka implementasi MBS di SMK Negeri 1 Pana, berdasarkan pengamatan awal dan percakapan dengan beberapa orang tua siswa, ada indikasi kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sekolah sehingga realisasi program MBS belum berjalan maksimal sesuai standar yang

seharusnya. Sehubungan dengan hal itu, diperoleh informasi bahwa kurangnya peran serta masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) sikap orang tua yang lebih menyerahkan sepenuhnya pengaturan MBS kepada sekolah, (2) sosialisasi dan informasi mengenai program pengembangan MBS masih kurang, (3) kurangnya dukungan orang tua siswa terhadap pelaksanaan program MBS terutama dalam bentuk dukungan dana, (4) rendahnya tingkat pendidikan orang tua siswa, dan (5) rendahnya tingkat pendapatan/penghasilan orang tua siswa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka peneliti ingin memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah ditinjau dari manajemen organisasi, manajemen kesiswaan, dan manajemen keuangan di SMK Negeri 1 Pana Kabupaten Mamasa.

PERMASALAHAN

Bagaimana implementasi MBS di SMK Negeri 1 Pana ditinjau dari segi:

1. manajemen organisasi,
2. manajemen kesiswaan, dan
3. manajemen keuangan.

METODE

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian jenis ini dimaksudkan untuk mencari fakta, keadaan, fenomena-fenomena yang kemudian dideskripsikan, serta menganalisa secara mendalam tentang Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMK Negeri 1 Pana, kabupaten Mamasa.

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Pana, Kecamatan Pana, Kabupaten Mamasa, Propensi Sulawesi Barat pada tanggal 7 s.d 9 Desember 2015. Fokus penelitian dibatasi pada implementasi MBS

yang meliputi (1) manajemen organisasi, (2) manajemen kesiswaan, dan (3) manajemen keuangan.

PEMBAHASAN

Manajemen menurut Stoner, dkk (1995), merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

a. Manajemen organisasi

Manajemen organisasi merupakan salah satu komponen dari implementasi manajemen berbasis sekolah. Standarisasi organisasi dan manajemen sekolah bertujuan untuk memastikan bahwa struktur, personalia dan uraian tugas telah disusun sedemikian rupa sehingga mencerminkan sistem organisasi yang profesional. Menurut Arismunandar (2006), dari segi struktur, maka kelembagaan sekolah harus mencerminkan bidang tugasnya termasuk pertimbangan unit-unit kerja yang diperlukan berdasarkan analisis jabatan. Dari segi personalia, diperlukan standarisasi mengenai kualifikasi profesional pejabat yang menduduki jabatan terutama pada posisi kepala dan wakil kepala sehingga tidak lagi terjadi pengisian jabatan oleh personil yang tidak memenuhi persyaratan.

Berdasarkan dokumen dan hasil observasi menunjukkan bahwa pengorganisasian personalia di sekolah ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang disesuaikan dengan pendekatan kemampuan personal. Berikut disajikan data personalia dengan tugas tertentu di SMK Negeri 1 Pana dengan bidang tugasnya:

Pembagian Tugas Khusus SMK Negeri 1 Pana

No	Nama	Bidang Tugas
1	Kalo, S.Pd	Kepala Sekolah
2	Jim Sigalotang, S.Pd	Wa. Kasek Kurikulum
3	Bernad Bongga P., S.Pd	Wa. Kasek Kesiswaan
4	Jonias Solon, S.Pd	Wa. Kasek Sarpras
5	Semuel M., S. Pd	Wa. Kasek Humas
6	Hendrika Sambo Bulawan, SE	Ketua Program Adm. Perkantoran
7	Arni Arruan Tasik., A.Md.Kom	Kepala Lap Komputer
8	Dewi, SH	Kepala Perpustakaan
9	Lambertus Layuk, S.T.P	Ketua Program Pertanian
10	Marlin Kamban, S.Pd	Kepala Lap Biologi

Data di peroleh tanggal 9 Desember 2015

Dalam pengelolaan manajemen organisasi dan kelembagaan sekolah tersebut, penting dipahami bahwa posisi kepala sekolah hendaknya lebih menekankan pelaksanaan fungsi kepemimpinan ketimbang kekuasaan. Bahkan ditinjau dai segi pembagian tugas harus dapat dijamin bahwa semua personil mendapat tugas yang adil dan dengan jelas memahami tugas-tugasnya dengan jelas sehingga berdasarkan hal itu kinerja mereka di nilai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru yang ada di sekolah ini, menunjukkan bahwa pembagian tugas dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Semua guru dan pegawai telah paham dan mengerti apa yang menjadi bidang tugasnya. Berikut salah satu petikan wawancara dengan Kornelius, S.Pd (guru mata pelajaran Fisika)

“ setiap awal tahun ajaran di sekolah kami selalu diadakan rapat pembagian tugas yang disesuaikan dengan bidang keahlian kami, dan diberikan tugas tambahan sesuai kemampuan kami. Saya dalam hal ini diberikan tugas tambahan sebagai”
(wawancara tanggal 7 Desember 2015).

Sehubungan dengan manajemen organisasi dan kelembagaan sekolah, maka indikator pelaksanaan dalam MBS adalah: (1) memiliki struktur organisasi sekolah, (2) membentuk komite sekolah, dan (3) struktur komite.

Penerapan MBS yang meliputi struktur organisasi sekolah, komite sekolah, dan komite telah dilaksanakan di sekolah ini dengan baik. dari hasil pengamatan dapat disajikan struktur organisasi yang dimaksud berikut ini:

Struktur Organisasi Komite SMK Negeri 1 Pana Tahun 2015

No	Nama	Jabatan
1	T. Tumonglo	Ketua
2	Petrus Londe	Sekretaris
3	Semuel M., S.Pd	Bendahara

(Obsevasi dokumen dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2015)

Manajemen organisasi telah diterapkan sekolah ini dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan terorganisirnya pelaksana kegiatan sekolah, kesiswaan, keuangan, dan komite sekolah. Dengan demikian sekolah diharapkan terus berupaya dengan sumber yang ada untuk terus meningkatkan pelayanan kepada peserta didik, sehingga SMK sebagai satu-satunya sekolah tertinggi di daerah ini dapat dicintai masyarakat.

b. Manajemen kesiswaan

Standarisasi manajemen kesiswaan dimaksudkan untuk menjamin bahwa sekolah memiliki kecenderungan peningkatan dalam hal pendaftaran siswa, kenaikan kelas, kelulusan, putus sekolah dan mengulang kelas. Selain itu manajemen kesiswaan juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem rekrutmen siswa sesuai dengan peraturan dan penempatannya tidak lebih dari 40 siswa dalam kelas, termasuk penyediaan kegiatan kesiswaan, khususnya kokurikuler.

SMK Negeri 1 Pana memiliki fasilitas gedung yang sangat memadai serta fasilitas seperti ruang ruang belajar laboratorium komputer dan lain-lain. Hal ini memungkinkan terselenggaranya proses belajar mengajar dengan baik. Fasilitas gedung yang dimiliki sekolah ini dsajikan sebagai berikut:

Keadaan gedung SMK Negeri 1 Pana Tahun 2105

RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
Kantor	1	Baik
Ruang belajar	9	Baik
Ruang Komputer	1	Baik
Ruang Guru	1	Baik
Ruang Administrasi	1	Baik
Gudang	1	Baik

(Dokumen di amati pada tanggal 8 Desember 2015)

Selain itu penerimaan siswa baru dari tahun ke tahun terus meningkat. dari data dokumen diperoleh perkembangan siswa sebagai berikut:

Keadaan Siswa Baru 2 Tahun terakhir

No	Tahun Pelajaran	Jumlah
1	2013/2014	37
1	2014/2015	41

(Dokumen di amati pada tanggal 8 Desember 2015)

Manajemen kesiswaan sebagai salah satu komponen MBS mencakup pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur sesuai dengan tujuan pendidikan sekolah. Untuk tujuan tersebut manajemen kesiswaan menurut Sutisna (dalam Mulyasa, 2004) mencakup tiga tugas utama yaitu penerimaan siswa baru, kemajuan belajar serta bimbingan dan pembinaan disiplin.

Penanganan siswa di sekolah ini di kelolah dengan baik. Hal ini ditandai dengan diberikannya mandat kepada salah seorang guru untuk menangani bidang bimbingan dan pembinaan disiplin dan kepada tenaga administrasi untuk menangani pendataan siswa baru. Salah satu petikan wawancara dengan guru yang menangani kesiswaan yakni: “..... saya diberi tugas tambahan sebagai kesiswaan di sekolah ini hampir 5 tahun. Menurut saya siswa yang ada di sekolah kami masih kami mampu tangani dengan baik. “ (Wawancara pada tanggal 8 Desember 2015)

Tujuan pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan anak, tetapi juga sikap kepribadian, serta aspek sosial emosional, di samping keterampilan-keterampilan lain. Demikian juga sekolah tidak hanya bertanggung jawab memberikan berbagai ilmu pengetahuan, tetapi memberi bimbingan dan bantuan terhadap anak-anak yang bermasalah, baik dalam belajar, emosional, maupun sosial sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk itu dalam rangka memperoleh data peserta didik secara lengkap, maka sekolah perlu melakukan pencatatan ketatalaksanaan kesiswaan, dalam bentuk buku induk, buku klapper, buku laporan keadaan siswa, buku presensi siswa, buku rapor, daftar kenaikan kelas, buku mutasi dan sebagainya.

Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa di sekolah ini memiliki kelengkapan administrasi kesiswaan. Dokumen seperti buku induk, buku klapper, buku laporan keadaan siswa, buku presensi siswa, buku rapor, daftar kenaikan kelas, buku mutasi tertata dengan rapi dan telah terisi dengan data-data yang sesuai. (pengamatan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015).

Diterapkannya manajemen kesiswaan yang baik dan benar mengindikasikan bahwa sekolah telah berupaya maksimal dalam mengelolah kesiswaan. Namun demikian sekolah harus terus harus berupaya melakukan inivasi-inovasi dalam pananganan siswa sehingga pelayanan kepada siswa dimaksimalkan.

c. Manajemen keuangan

Standarisasi pengelolaan manajemen keuangan dan pembiayaan dalam MBS bertujuan untuk menjamin ketersediaan biaya penyelenggaraan pendidikan. Setiap tahun, sekolah perlu membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) di mana di dalamnya sudah mengalokasikan sumber pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan meliputi: bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dana masyarakat, dan sumber lain seperti hibah, usaha sekolah dan pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku. Sekolah yang baik menurut Arismunandar (2006), adalah jika persentase pembiayaan oleh masyarakat dan usaha lainnya lebih besar dari persentase penerimaan bantuan pemerintah.

Berdasar pada pengamatan dokumen RAPBS menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam hal pembiayaan sekolah masih sangat memprihatinkan. Kondisi ini mengharuskan sekolah mengelolah sekolah sesuia dana bantuan pemerintah. Berikut disajikan data sumber dana sekolah:

Sumber dana Operasional SMK Negeri 1 Pana Tahun 2015

No	Sumber dana	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Bantuan Operasional Sekolah	64.400.000.-	Operasional 6 bulan
2	Bantuan Masyarakat	-	

(Data di amati pada tanggal 9 Desember 2015)

Dimensi keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah gaji yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai, biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran habis pakai, sedangkan biaya pembangunan misalnya biaya pembangunan, seperti pengembangan tanah pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang yang tidak habis pakai. Dalam rangka implementasi MBS, lebih lanjut Mulyasa (2004), menjelaskan bahwa manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku agar semua dana benar-benar dimanfaatkan secara efektif dan efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemanfaatan sumber dana yang ada di sekolah ini dikelola dengan baik. Sebelum dana dimanfaatkan kepala sekolah, guru, pegawai dan komite sekolah duduk bersama untuk menyatukan persepsi peruntukan dana. Dana dikelola transparan dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan dengan dipampangnya pengalokasian dana yang dikelola sekolah pada papan pengumuman. (data diperoleh dengan pengamatan tanggal 9 Desember 2015).

Oleh sebab itu dalam manajemen pengelolaan keuangan dan pembiayaan, kepala sekolah sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi ordonator (melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran), namun tidak diperkenankan melakukan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam.

Terkait dengan penyelenggaraan keuangan, sekolah ini memiliki personil khusus yang menangani keuangan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian keuangan, diungkapkan bahwa selama mengelolah uang sekolah tidak pernah ada intimidasi dari pihak manapun terkait pengelolaan dana sekolah. Dijelaskan bahwa kepala sekolah hanya memonitoring penyaluran dana yang ada sesuai peruntukannya. Berikut salah satu petikan wawancara dengan keuangan sekolah:

“...selama kurang lebih 5 tahun saya sebagai pengelola dan penyalur uang di sekolah ini, belum pernah mengalami masalah yang serius. Dana yang ada dikelola dengan baik sesuai dengan hasil musyawarah sebelumnya. Mengenai penyaluran dana/uang, memang kepala sekolah selalu memonitoring sejauh mana penyalurannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur dan hasil musyawarah....) wawancara dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan di SMK Negeri 1 Pana telah diimplementasikan dengan baik. Namun yang menjadi permasalahan adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu sekolah terutama melalui bantuan dana. Oleh karena itu sekolah dengan segala kemampuan yang ada harus memiliki strategi pendekatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terdorong untuk membantu sekolah terutama bantuan dana.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Manajemen organisasi di SMK Negeri 1 Pana telah di implementasikan dengan baik. Indikatornya adalah dengan terorganisirnya personalia dengan bidang tugas masing-masing.
2. Manajemen kesiswaan di SMK Negeri 1 Pana dikelola dengan baik oleh guru/pegawai dan telah memenuhi

standar pengelolaan, yakni tertatanya dengan baik administrasi kesiswaan, dan tersedianya layanan bagi siswa yang membutuhkan layanan khusus.

3. Manajemen keuangan dengan sumber dana yang ada telah dikelola dengan baik sesuai peruntukannya. Bantuan masyarakat berupa dana sama sekali belum ada

b. Saran

Sebaiknya sekolah terus meningkatkan kemampuan manajerialnya sehingga masyarakat ikut berpartisipasi terutama bantuan dana ke sekolah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arismunandar. 2006. *Manajemen Pendidikan. Peluang dan Tantangan*. (cetakan kedua). Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Mulyasa, E. 2004a. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*. (cetakan ketujuh). Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- _____, E. 2004b. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional, dalam konteks menyukseskan MBS dan KBK*. (cetakan keempat). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Sagala, S. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat- Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*. (cetakan pertama) Jakarta: PT. Nimas Multima.
- Stoner, James A.F., Freeman, R.E., & Gilbert, Jr.D.R. (1995). *Management* (edisi keenam). USA: Prentice Hall, Inc.
- Undang-Undang RI Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.